BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi memerlukan aspek pokok yang disebut dengan sumber daya (r*esources*) baik sumber daya alam (*natural resources*) maupun sumber daya manusia (*human resources*). Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pada dasarnya, sumber daya alam (SDA) merupakan aset yang dimiliki suatu negara yang meliputi tanah dan kekayaan alam, seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi tinggi sangat mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, sumber daya alam yang ada tersebut tidak sendirinya diolah oleh alam, akan tetapi perlu adanya sumber daya manusia (SDM), guna mengolah sumber daya alam tersebut. Keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi atau disebut sebagai proses produksi. Sumber daya manusia dapat dikatakan adalah yang terpenting, karena jika sebuah negara memiliki suatu SDM yang terampil dan berkualitas maka ia akan mampu mengolah SDA yang jumlahnya terbatas. (Christanto, 2019)

Pembangunan ekonomi sendiri tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan begitu

sebaliknya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Adapun perbedaan dari defenisi pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya kenaikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memperkirakan apakah berdampak kepada pertumbuhan atau pertambahan jumlah penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi memiliki definisi sebuah proses multidimensional terhadap perubahan sosial. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Adapun faktor faktor tersebut adalah faktor ekonomi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, keahlian atau kewirausahaan, sedangkan untuk faktor non ekonomi terdiri dari sosial kultural, kondisi politik, perkembangan dan perubahan sistem yang berlaku, institusi atau kelembagaan. (Jhingan 2010:67).

Priyatno (1986) menyatakan bahwa di dalam pembangunan ekonomi selalu muncul permasalahan dalam menentukan strategi dasar pembangunannya, yaitu memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan. Tingginya ekonomi suatu daerah memang tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tetap dianggap sebagai suatu strategi unggul dalam pembangunan ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dikaji dalam suatu lingkup wilayah tertentu seperti negara, bagian-bagian regional, provinsi, kabupaten / kota, kecamatan hingga desa. Sementara industry yang paling berperan dalam pembangunan dan pengembangan sarana prasarana ialah industry kontruksi. Sektor konstruksi juga dapat dilihat sebagai sebuah proses *input-output* dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. Input berupa material, tenaga kerja, peralatan, waktu dan uang selanjutnya akan diubah melalui proses konstruksi

menjadi produk output berupa gedung, jalan, bangunan irigasi atau infrastruktur lainnya. Sektor konstruksi memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dengan sektor lain. Keterkaitan kebelakang dalam arti bahwa untuk menghasilkan satu satuan output produk konstruksi diperlukan beberapa macam produk yang dihasilkan dari industri lainya, misalnya input berupa tenaga kerja, material (baja, seng, semen, besi, dan material lainya) yang berasal dari industri manufaktur. Sedangkan sisi outputnya berupa (irigasi, jalan, jembatan, pelabuhan) diperlukan oleh industri lainnya sebagai sarana pendukung suatu proses produksi, proses semacam inilah yang disebut sebagai proses input-output.

Hasil output dari kegiatan konstruksi ialah barang publik dan barang privat. Barang publik atau seringkali dikenal dengan infrastruktur atau prasarana. Sedangkan barang privat adalah hasil kegiatan yang kepemilikannya adalah orang perorang atau badan usaha, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dari pembiayaannya, terdapat pula dua kemungkinan kegiatan konstruksi dapat diselenggarakan, yaitu pembiayaan oleh Negara (melalui pemerintah) dan oleh swasta. Pemerintah memiliki peran strategis dalam pembinaan konstruksi dan investasi. Secara praktis peran pembinaan ini sangat erat kaitannya dengan domain manajemen pemerintah dalam melakukan pengaturan, pengawasan dan pemberdayaan sektor konstruksi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan apa yang menjadi urusan pemerintah kaitannya dengan pembinaan konstruksi dan investasi swasta. (Dokakd DPR RI, 2015)

Tarigan dkk (2017:1) berpandangan bahwa sektor konstruksi mempunyai peran penting dalam menggerakkan sektor riil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas serta

daya saing konstruksi. Industri konstruksi sendiri merupakan suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan/perombakan bangunan. Badan Pusat Statistik (2017:3).

Kabupaten Halmahera Tengah sebagai salah satu kabupaten bagian dari provinsi Maluku Utara dimana terdapat kawasan industry tambang. Dulu PT. Antam Indonesia beroperasi di Pulau Gebe dan sekarang tecatat terdapat 18 perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Halmahera Tengah, yakni 8 perusahaan beroperasi di Pulau Gebe, 3 perusahaan beroperasi di Kecamatan Weda Utara, dan 5 perusahaan diantaranya beroperasi di Kecamatan Weda Tengah, sementara 2 perusahaan lainnya belum mengkonfirmasi lokasi operasional perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Weda Tengah dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Yang Beroperasi di Kecamatan Weda Tengah

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	PT. Sinar Karya Mustika Site Weda	Weda Tengah
2	PT. Weda Bay Nikel	Weda Tengah
3	PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park	Weda Tengah
4	PT. Nawakara	Weda Tengah
5	PT. Tekindo Energi	Weda Tengah

Sumber : news.malutpost.co.id. 2018

Maraknya perusahaan dalam negeri dan asing yang berinvestasi dan mengeksploitasi sumberdaya alam menyebabkan pemerintah provinsi Maluku Utara membuat kebijakan dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana pada Bab II Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa tujuan dari penyelengaraan penanaman modal daerah antara lain adalah untuk: 1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 2). Menciptakan lapangan kerja. 3). Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. 4). Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah. 5). Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi local. 6). Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah. 7). Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 8). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi, Saputri (2014: 28-29) menjelaskan bahwa terdapat dua hal esensial yang harus dilakukan, yaitu: Pertama, sumber-sumber harus digunakan secara lebih efisien. Kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut harus diusahakan pertambahannya. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Sumber-sumber alam. Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral, dan tambang, iklim, dan lain-lain.
2. Sumber-sumber tenaga kerja. Masaah sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitasnya sangat rendah.

3. Kualitas tenaga kerja. Negara-negara sedang berkembang, biasanya tidak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas SDM untuk pendidikan dan latihan kerja serta memelihara kesehatan masyarakat.
4. Akumulasi kapital. Untuk mengadakan akumulasi kapital diperlukan pengorbanan atau penyisihan pengeluaran. Di negara sedang berkembang, tingkat pendapatan rendah, mengakibatkan menyisihkan tabungan sukar dilakukan.

Laju pertumbuhan PDRB Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Tabel 1.2.

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah

Uraian Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	3.87	5.4	3.35	3.26	2.61	2.74	2.52	3.04	2.91	1.01
B. Pertambangan dan Penggalian	-	2.09	2.16	2.2	-28.47	-3.96	1.42	10.66	10.09	0.44	1.93
C. Industri Pengolahan	-	2.13	3.01	6.99	8.56	5.36	280.01	12.83	15.1	-35.16	354.66
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-	20.87	-6.1	10.73	17.62	17.82	24.63	8.21	1.68	9.55	8.24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	3.93	3.79	3.44	4.5	1.28	0.16	3.83	5.87	5.23	3.54
F. Konstruksi	-	9.52	12.34	4.79	6.81	6.94	4.02	7.28	6.59	73.37	2.55
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	5.36	7.18	12.82	10.87	9.83	4.09	4.25	9.12	8.13	0.15
H. Transportasi dan Pergudangan	-	4.82	7.75	6.87	8.26	8.55	4.32	8.93	8.13	8.16	-0.91
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	3.22	3.13	3.83	2.42	2.47	3.34	8.68	9.1	12.53	-0.32
J. Informasi dan Komunikasi	-	7.07	6.65	8.79	10.57	8.78	4.68	6.77	4.69	13.74	9.36
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-	15.79	3.9	9.31	6.45	5.96	5.86	1.67	6.02	5.91	5.07
L. Real Estate	-	6.53	5.5	4.66	5.99	6.05	2.84	3.18	2.46	5.99	2.4
M,N. Jasa Perusahaan	-	4.63	4.38	7.33	5.89	5.91	5.79	5.88	5.36	4.92	0.26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	9.56	4.5	6.55	9.46	7.63	2.85	2.48	2.88	10.77	0.79
P. Jasa Pendidikan	-	6.85	4.9	3.84	5.52	5.76	3.74	7.72	6.34	10.06	0.03
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	6.27	5.99	8.49	7.61	8.14	4.75	6.85	8.88	9.15	6.09
R,S,T,U. Jasa lainnya	-	2.88	4.85	3.08	5.55	5.89	5.96	4.67	7.54	5.97	-1.56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-	5.26	5.02	5.29	-1.9	4.34	11.24	5.8	6.96	6.57	26.34

Dari tabel 1.2. dapat dianalisis mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupatehn Halmahera Tengah dalam kajian 17 sektor perekonomian bahwa pertumbuhan ekonomi masih berfluktuatif seiring dengan skala prioritas pembangunan dibandingkan pada tahun dasar 2010. Pada lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi sectoral masih didominasi oleh sector kontruksi dengan pertumbuhan sebesar 73.37% dan sector industry pengolahan 354.66% pada tahun 2020.

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah memiliki kendala klasik yakni pada biaya serta pasokan bahan material yang tidak dihasilkan oleh dalam wilayah pembangunan, lokasi pembangunan, upah pekerja, jumlah sumber daya pekerja. Hal tersebut terangkum dalam Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK). IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing (BPS Provinsi, 2020).

Hakim (2017) menjelaskan bahwa IKK digunakan untuk mengukur letak geografis suatu wilayah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. IKK yang tinggi menggambarkan buruknya kondisi infrastruktur suatu daerah, sehingga infrastruktur yang buruk mengakibatkan aksesibilitas daerah tersebut sulit dan mobilitas menjadi rendah yang berdampak pada kegiatan perekonomian sehingga akan menghambat

daerah dalam proses pembangunan manusia. Kemahalan konstruksi memiliki hubungan yang negatif terhadap pembangunan manusia. Semakin meningkat angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) maka semakin menurun angka IPM begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan angka IKK yang meningkat dapat mengurangi penyaluran akumulasi modal terhadap pembangunan manusia. (Rahmadhani dan Idris 2019:303)

Hal ini menjadi permasalahan karena tujuan paling penting dalam percepatan pembangunan dan perluasan ekonomi adalah peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat, dalam artian bahwa arah pembangunan ekonomi suatu daerah juga mengarah pada pembangunan manusia di daerah tersebut. Menurut Mirza (2012) pembangunan manusia merupakan suatu proses pembangunan yang memiliki tujuan agar masyarakat mampu memiliki banyak pilihan khususnya dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan yang terukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Cakupan pembangunan manusia yang luas menyebabkan peningkatan IPM yang dapat ditafsirkan sebagai suatu keberhasilan dalam peningkatan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya daerah masing-masing. Keberhasilan pembangunan manusia akan menghasilkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang juga mengartikan bahwa terdapat peningkatan dalam segi pendidikan dan kesehatan sehingga menghasilkan tenaga kerja dengan keterampilan / skill yang kompetitif dan masa produktif yang lebih lama.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kemahalan Kontruksi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah memuat penjabaran pokok permasalahan yang akan diteliti dengan berpatokan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan menjadi rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Indeks Kemahalan Kontruksi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Tengah
2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Tengah
3. Apakah Indeks Kemahalan Kontruksi dan Pembangunan Ekonomi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang menjadi fokus dan batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Indeks Kemahalan Kontruksi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Tengah

2. Untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Tengah
3. Untuk mengetahui apakah Indeks Kemahalan Kontruksi dan Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :
   a. Menambah khasanah pengetahuan mengenai pengaruh IKK, dan Pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Tengah.
   b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan penelitian ilmu ekonomi selanjutnya
2. Dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :
   a. Untuk penulis : sebagai bahan implementasi dari ilmu pengetahuan ekonomi pembangunan yang selama ini dipelajari di perkuliahan.
   b. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah: sebagai bahan pengetahuan dan informasi untuk menyusun kebijakan terkait strategi pembangunan ekonomi.